

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADANG LOANG KABUPATEN  
WAJO (TINJAUAN MANAJEMEN SYARIAH)**



**OLEH**

**SYAMSIDAR  
NIM: 19.2900.002**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGRI  
PAREPARE**

**2024**

**IMPILIKASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADANG LOANG KABUPATEN  
WAJO (TINJAUAN MANAJEMEN SYARIAH)**



**OLEH**

**SYAMSIDAR  
NIM: 19.2900.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.E.) pada  
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGRI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implikasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)

Nama Mahasiswa : Syamsidar

Nim : 19.2900.002

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.5494/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. 

NIP : 19890208 201903 2 012

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Muhammadulfa Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 2001 12 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)

Nama Mahasiswa : Syamsidar

Nim : 19.2900.002

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.5494/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. (Sekretaris)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Darwis, S.E., M.Si. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 2001 12 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi Syariah” Insititut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Maha Guru kami, Ibunda Nurhayati, ayahanda tercinta Hasanuddin dan saudara-saudaraku Nurlindah, Ahmad Zidik Hazan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan nasehat dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof., Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Nurfadilah, S.E., M.M. Selaku Ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

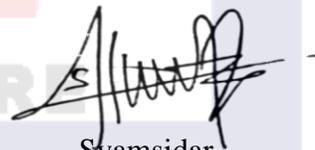
4. Bapak Dr. Zainal Said, M.H. sebagai “Dosen Penguji” yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini.
5. Bapak Darwis, S.E., M.Si. sebagai “Dosen Penguji” yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini.
6. Bapak/Ibu dosen Pasca Sarjana Program Studi “Manajemen Keuangan Syariah” yang telah meluangkan banyak waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Serta teman seperjuangan tercinta, Harviana dan Hasmira yang selalu setia kebersamai disaat susah maupun senang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun materil hingga tulisan ini dapat diseaikan. Semoga Allah swt. Menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan melimpahkan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Januari 2024  
5 Rajab 1445 H

Penulis,



Syamsidar  
19.2900.002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syamsidar  
Nim : 19.2900.002  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Loang, 15 Mei 2001  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implikasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesabaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Januari 2024  
5 Rajab 1445 H

Penulis,



Syamsidar  
19.2900.002

## ABSTRAK

*Syamsidar. 2024. Implikasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah). Skripsi dibimbing oleh Bapak Moh.Yasin Soumena dan ibu Sri Wahyuni Nur.*

Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintah. Termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Padang Loang 2) Mengetahui tinjauan manajemen syariah terhadap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Mengetahui implikasi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Padang Loang. Kegunaan penelitian agar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan yang di ambil dan sebagai pedoman program dana desa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan dana desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segi bidang infrastruktur, dimana infrastruktur dengan adanya perbaikan jalan, pengadaan lampu jalan. Akan tetapi belum bisa dikatakan sejahtera dikarenakan pembangunan yang dilakukan di desa Padang Loang belum sepenuhnya merata. Adapun Implikasi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di desa Padang Loang itu sangat membantuh masyarakat, akan tetapi dalam penanggulangan bencana belum nampak di masyarakat. Pengelolaan dana desa di Desa Padang Loang telah sesuai dengan analisis manajemen syariah, dimana semua aspek manajemen yang terkait disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah SWT.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Dana Desa, Implikasi, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Manajemen Syariah*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Manajemen Syariah.....	12
2. Teori Pengelolaan.....	20
3. Teori Dana Desa.....	23
4. Teori Kesejahteraan Masyarakat.....	31
5. Teori Implikasi .....	37
C. Tinjauan Konseptual.....	38

D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian .....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Pengelolaan Dana Desa Padang Loang.....	46
2. Pengelolaan dana desa dalam manajemen syariah di desa Padang Loang.....	60
3. Implikasi dalam pengelolaan dana desa di desa Padang Loang terhadap kesejahteraan masyarakat.....	61
B. Pembahasan .....	65
1. Pengelolaan dana desa di Desa Padang Loang .....	65
2. Pengelolaan dana desa dalam manajemen syariah di Desa Padang Loang .....	68
3. Implikasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Padang Loang.....	71
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN.....	79
BIODATA PENULIS .....	96

## DAFTAR TABEL

<b>No.Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1	Pendapatan dan pengeluaran dana desa tahun 2020	51
4.2	Realisasi bidang I penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2020	52
4.3	Realisasi bidang II pelaksanaan pembangunan tahun 2020	52
4.4	Realisasi bidang III pembinaan kemasyarakatan	52
4.5	Realisasi bidang IV bidang pengurangan bencana, darurat dan mendesak	52
4.6	pendapatan dan pengeluaran dana desa tahun 2021	53
4.7	Realisasi bidang I penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2021	54
4.8	Realisasi bidang II pelaksanaan pembangunan desa tahun 2021	54
4.9	Realisasi bidang III pembinaan kemasyarakatan desa tahun 2021	55
4.10	realisasi bidang IV pemberdayaan masyarakat desa tahun 2021	55
4.11	Realisasi bidang V penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa tahun 2021	55
4.12	Pendapatan dan pengeluaran dana desa tahun 2022	56
4.13	Realisasi bidang I penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2022	57
4.14	realisasi bidang II pelaksanaan penggunaan desa tahun 2022	57
4.15	Realisasi bidang III pembinaan kemasyarakatan desa tahun 2022	57
4.16	realisasi bidang IV pemberdayaan masyarakat desa tahun 2022	57
4.17	realisasi bidang IV penanggulangan bencana, darurat dan mendesak tahun 2022	58
4.18	Rincian kegiatan yang di danai oleh dana desa	62

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	41



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	82
2	Revisi Judul Skripsi	84
3	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian	85
4	Surat Rekomendasi Penelitian	86
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti	87
6	Surat Keterangan Wawancara	88
7	Data Kepala Desa dan Perangkat Desa	95
8	Foto Pembangunan Desa	96
9	Biografi Penulis	98

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

**Hamza (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau akhir, ditulis dengan tanda (‘).**

## 2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berpagabunganhuruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

contoh :

كَيْفَى : Kaifa

حَوْلَى : Haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harta dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / أَي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
أُو	Kasrah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتَى : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tā''marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā''marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā''marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā''marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā''marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

#### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma,,arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah*

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan apapun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan di bidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Pembangunan desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan pembangunan masyarakat desa (PMD), pembangunan desa(bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “pemberdayaan masyarakat desa (PMD)”. Pada masa order baru secara substansi pembangunan desa lebih bersifat top-down, pada era reformasi secara substansi pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepala desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran fasilitator, memberikan bantuan dana, pembinaan, pengawasan. Telah

---

<sup>1</sup> Ioncolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h.

banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya program I npres desa tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat *button-up* atau kombinasi *button-updan* dan *top-down*. Program pembangunan desa yang bersifat *button-up* tertuang dalam undang-undang otomi d aerah (OTDA).<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembanguana pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk dana desa (DD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Namun pemerintah daerah harus melakukan optimasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for monay*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang diteransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Azwardi Sakanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Profinsi Sumatra Selatan, (Tesis Fakultas ekonomi Universitas Seriwijaya, 2012), h. 30

<sup>3</sup> S. Supriyanto, Penelolan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah, ( Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal), ISTIKLAF: Jurnal Ekonomi, Perbangkan dan Manajemen Syariah, 2021, h. 1-16

<sup>4</sup> P. Marvianto,R, Efektivitasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa (Study di Desa Mojogede Kec Balongpanggang Kab Gresik), Publik. Untang Surabaya 2018

Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan merata. Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di desa akan memberikan dampak positif untuk desa. pemanfaatan dana desa disalurkan untuk kepentingan di desa baik dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Namun dari sisi lain sebagai masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi dengan adanya dana sehingga masyarakat tidak paham realisasi dana desa. ini diakibatkan tidak ada peran aktif sebagian masyarakat dalam ikut rapat yang dibuat oleh pemerintah desa. ini juga berdampak tidak baik dalam ikut serta sebagai masyarakat tidak ada kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan dana desa.<sup>5</sup>

Secara umum prioritas penggunaan dana desa terhadap ditunjukkan untuk dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. penggunaan dana desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Dalam hal program kesejahteraan saat ini dana desa diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur pedesaan sebagai salah satu solusi untuk memperkuat kesejahteraan di wilayah pedesaan.

Dari pengamatan awal penulis, kegiatan pembangunan di desa Padang Loang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, berbagai infrastruktur fisik dan sarana penunjang kesejahteraan seperti akses jalan ke lokasi pertanian warga, perbaikan kantor desa, lampu jalan. Namun pelaksanaan ADD tersebut belum merata setiap dusun sehingga terkesan hanya dusun tertentu, sehingga tidak semua

---

<sup>5</sup> M. Abidin, Z, Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2015), 6(1), 61-76

warga dapat menikmati hal tersebut dengan demikian juga dari sisi pertambahan pendapatan belum merata, karna tidak semua masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga awal perkiraan bahwa dampak dari pengelolaan dana desa tersebut dirasakan belum menyentuh sepenuhnya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pengelolaan dana secara syariah telah menjadi terobosan terbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana secara syariah adalah pengelolaan dana yang dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pengelolaan dana secara syariah didasarkan pada konsep berbagai risiko (*risk sharing*), keadilan (*justice*), dan keberpihakan pada masyarakat (*social responsibility*). Hal ini dikarenakan pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah dimana prinsip yang terdapat dalam agama islam, seperti adil, transparan, tidak merugikan masyarakat, dan sebagainya.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa poin yang Peneliti anggap penting sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Padang Loang?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam manajemen syariah di Desa Padang Loang?
3. Bagaimana implikasi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Padang Loang?

---

<sup>6</sup> A. Fadilah, dan Makhrus, M, Pengelolaan Dana Tabarru pada Asuransi Syariah dan Realisasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019), 2(1), 87

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan diharapkan agar mencapai tujuan sebagaimana yang telah diinginkan sebelumnya, tujuan diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai setelah selesainya suatu kegiatan. Dengan demikian, sama pula halnya dengan penelitian ini, yang merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Padang Loang.
2. Untuk mengetahui tinjauan manajemen syariah terhadap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Padang Loang.
3. Untuk mengetahui implikasi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Padang Loang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

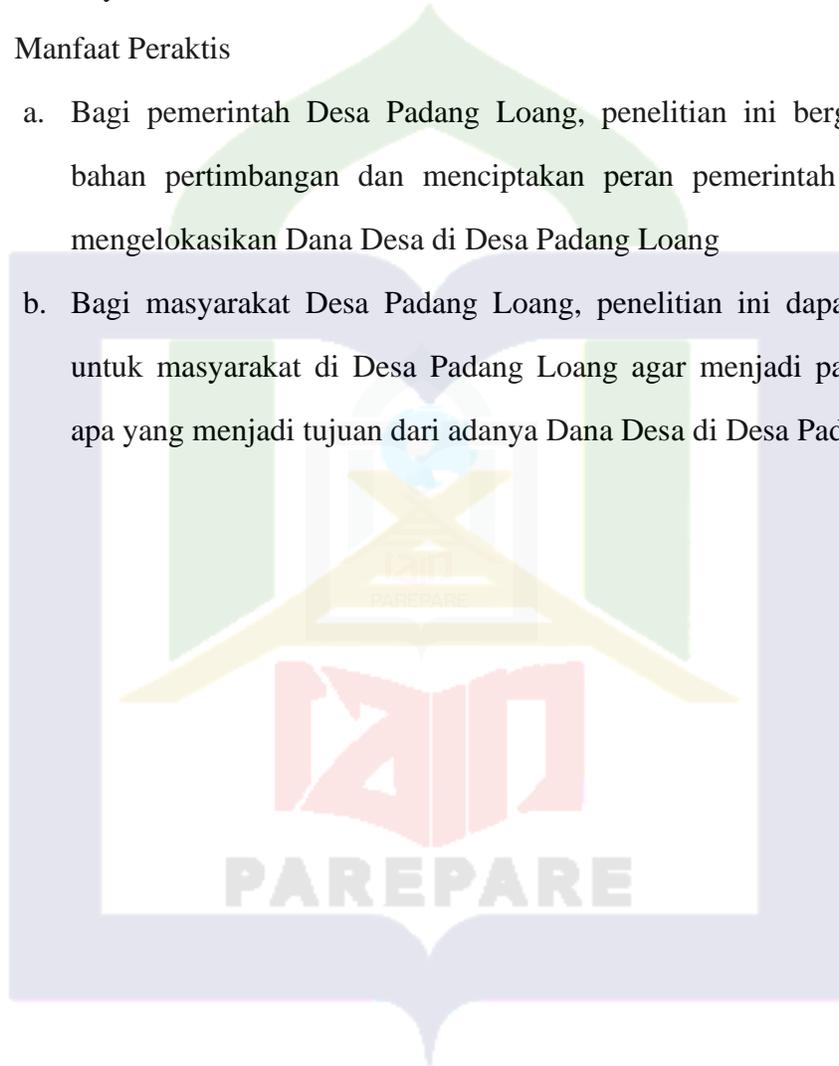
Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas serta meningkatkan wawasan bagi pengembangan ilmu pengelolaan keuangan sekaligus sebagai bahan pengetahuan dan informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang baik bagi pemerintah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang implikasi pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Manfaat Peraktis

- a. Bagi pemerintah Desa Padang Loang, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan menciptakan peran pemerintah desa dalam mengelokasikan Dana Desa di Desa Padang Loang
- b. Bagi masyarakat Desa Padang Loang, penelitian ini dapat jadi acuan untuk masyarakat di Desa Padang Loang agar menjadi paham tentang apa yang menjadi tujuan dari adanya Dana Desa di Desa Padang Loang



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan bagi Penulis dalam melakukan penelitian sehingga Penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Dari tinjauan penelitian terdahulu ada beberapa karya tulis terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Bagus Prihatin Wicaksananta dengan Judul “Analisa Manajemen Syariah dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Bantuan Langsung Tunai Desa dalam hal Identifikasi Kelompok Penerima Manfaat masih lemah ini terbukti dengan ketidaksesuaian penyaluran BLT Dana Desa minimal 40% dari Dana Desa sehingga jumlah KPM bantuan sosial berkurang dari seharusnya, Pengelolaan Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa berupa ketepatan sasaran masih terdapat duplikasi KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT; Terdapat permasalahan penerima BLT Dana Desa NIK ganda atau NIK invalid; Terdapat laporan dari masyarakat atas pengeolaan BLT Dana Desa tahun 2021 yang mana KPM digilir mendapat bantuan sosial tidak tetap selama setahun. Untuk saat ini Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tiga desa tersebut telah berjalan sampai dengan triwulan ke IV yakni

Bulan Januari hingga Desember 2022; Dampak yang positif adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini bisa membantu perekonomian masyarakat antara lain berupa peningkatan daya beli masyarakat yang terkena terdampak dari Covid-19.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian di atas menjadi persamaan penulis adalah penelitian tentang pengelolaan dana desa dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menjadi perbedaan adalah penelitian Bagus Prihatin, berfokus pada bantuan langsung tunai (BLT) dalam pengelolaan dana desa.

2. Penelitian dilakukan oleh Zerli Anita Dewi dengan Judul “Tinjauan Manajemen Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jombang Timur Provinsi Jambi”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses pengelolaan Dana Desa pada kantor Desa Jati Mulyo terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban. Tidak terrealisasinya program tersebut dikarenakan proses pengelolaan manajemen dana desa yang belum maksimal. Desa Jati Mulyo belum mencapai indikator diantaranya belum cukup baik akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi, akses yang dimaksud ini adalah perkerasan jalan yang belum maksimal sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengeluarkan hasil bertani. Dalam tinjauan manajemen syariah terhadap pengelolaan Dana Desa sendiri bahwasannya pelaksanaan Dana Desa masih

---

<sup>7</sup> L Bagus Prihatin Wicaksananta, Bq Ratna Mulhimah, and H Ahmad Amir Aziz, ‘Analisa Manajemen Syariah Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat’, *PALAPA*, 11.1 (2023), 264–92.

belum cukup memenuhi standar nilai-nilai dasar ekonomi islam, disini manajemen pengelolaan Dana Desa masih mengarah ke konvensional. Akan tetapi kalau dilihat dari sifat dari nilai syariah yang rabbani dimana pengawasan internal yang dilakukan dari hati nurani yang bergerak untuk menunjukkan ataupun mewujudkan sesuai tujuan, sudah dilakukan oleh aparat dan masyarakat dalam hal mengawasi pengelolaan Dana Desa baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>8</sup> Dari perbedaan penelitian saat ini adalah dari lokasi penelitiannya, dan adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengelolaan dana desa ditinjau dari manajemen syariah.

3. Penelitian dilakukan oleh Ardila Prihatyatama dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Masyarakat” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Rantau Badak Lamo sudah berjalan dengan baik, dan proses pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Masyarakat desa sangat setuju dengan adanya dana desa, dimana dana desa sangat penting dalam membantu pembangunan desanya. Dana desa bermanfaat dalam pembangunan desa sehingga dapat menjadi desa yang lebih baik dan masyarakat dapat merasakan perkembangan tersebut. Namun dari segi ekonomi menurut masyarakat belum bisa dirasakan karena masih terfokus pada pembangunan

---

<sup>8</sup> Zerli Anita Dewi and Muhammad Subhan, ‘Tinjauan Manajemen Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi’, *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2023), 170–91.

fisik.<sup>9</sup> Perbedaan dari penelitian saat ini yaitu pada lokasi penelitin, sedangkan persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama membahas pengelolaan dana desa dengan objek yang sama yaitu pada kesejahteraan masyarakat.

4. Penelitian dilakukan oleh Fera Nur Juwita dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”. Fokus penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?(2) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ditinjau dari perspektif manajemen syariah?. Penelitian ini dilakukan di lokasi Gayam . metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan pada objek penelitian dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1) Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam secara administratif sudah akuntabel, sedangkan dalam tahap perencanaan belum maksimal hal ini dapat diketahui bahwa belum semua masyarakat ikut berpartisipasi menyalurkan aspirasinya dan kurang mengetahui program apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah desa hal ini disebabkan oleh perangkat desa yang kurang berkoordinasi dengan masyarakat. 2) Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam tersebut belum sepenuhnya menerapkan landasan indikator manajemen

---

<sup>9</sup> Apdila Prihadyatama and Sasmito Widi Nugroho, ' Analisis Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Masyarakat', *Maqis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 6.2 (2021), 46-58.

syariah, karena ada temuan yang menunjukkan bahwa dari salah satu landasan indikator manajemen syariah yakni amanah masih belum optimal, dikarenakan dalam hal tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan. Namun, terdapat manajemen yang sesuai dengan landasan indikator manajemen syariah, yaitu fathanah, kejujuran dan kesadaran akan diperintah oleh Allah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.<sup>10</sup> Perbedaan dari penelitian saat ini yaitu karna penelitian dari Fera Nur Juwita berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang manajemen syariah.

5. Penelitian dilakukan oleh Nur Lailatul Farikha dengan Judul “Manajemen Bisnis Syariah pada UMKM Tas dan Dompot Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rejoslamet”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan pencarian data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti. Peneliti melaksanakan penelitian di UMKM tas dan Dompot Desa Rejoslamet untuk meneliti kegiatan bisnis yang dijalankan. Dalam penelitian ini, jika dilihat dari jenis datanya maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis UMKM tas dan dompot di Desa Rejoslamet berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dan dalam penerapan manajemen bisnis syariah adalah produk yang dihasilkan halal, mekanisme pengupahan yang adil atau sepadan dengan

---

<sup>10</sup> Fera Nur Juwita, ‘Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)’ (IAIN Kediri, 2021).

beban pekerjaan, promosi yang tidak mengandung unsur sara dan menerapkan kejujuran.<sup>11</sup> Perbedaan dari penelitian saat ini darisi objeknya, sedangkan dari persamaan dari penelitian saat ini adalah saling untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Manajemen Syariah

#### a. Pengertian Manajemen Syariah

Dalam *Webster, News Collegiate Dictionary* disebutkan bahwa manajemen berasal dari kata *to manage* berasal dari bahasa Italia “*managgio*” dari kata “*managgiare*” yang diambil dari bahasa Latin, dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. *Management* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>12</sup>

Istilah manajemen sebenarnya mengacu kepada proses pelaksanaan aktifitas yang diselesaikan secara efisien dengan dan melalui pendayagunaan orang lain.<sup>13</sup> Terry memberikan definisi: “*management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by*

---

<sup>11</sup> Nur Lailatul Farikha, ‘Manajemen Bisnis Syariah Pada UMKM Tas Dan Dompot Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rejoslamet’ (IAIN Ponorogo, 2023).

<sup>12</sup> Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 3

<sup>13</sup> Mariono, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Grha Guru, 2024), h. 16

*the use of human beings and other resources.*<sup>14</sup> Maksudnya manajemen sebagai suatu proses yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta melaksanakan sasaran/tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sumber-sumber lainnya. Arifin Abdurrachman sebagaimana dikutip oleh M. Ngalim Purwanto, memberikan pengertian manajemen merupakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana.<sup>15</sup>

Pada dasarnya ajaran islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As Sunnah juga Ijma' ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba rapi, benar, tertib, dan teratur. Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, jika setiap orang perilaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali.<sup>16</sup> Hal yang penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus memiliki sifat ri'ayah (jiwa kepemimpinan). Jiwa kepemimpinan menurut pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai khalifah fi al ardh.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Prof. Dr. H. Engkoswara dan Dr. Hj. Aan Komairah, M.Pd., Administrasi Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2012), h.87

<sup>15</sup> M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 7

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.1.

<sup>17</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sin, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.2

Menurut Didin dan Hendri, manajemen dapat dikatakan telah memenuhi syariah bila:

- 1) Manajemen syariah ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan
- 2) Manajemen syariah pun harus mementingkan adanya struktur organisasi.
- 3) Manajemen syariah membahas soal sistem, sistem ini disusun agar perilaku-perilaku didalamnya berjalan dengan baik.<sup>18</sup>

Proses-prosenya harus diikuti dengan baik. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT, sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran islam.<sup>19</sup>

#### b. Fungsi Manajemen Syariah

Menurut G.R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing*(pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pengarahan) dan *controlling* (pengawasan/pengamatan).<sup>20</sup> Hal ini juga tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam konteks sebagai falsafat umat islam.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendr Tanjung, Manajaemen Syariah dalam Praktik, 3-4

<sup>19</sup> Didin Hafiruddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, h.3-4

<sup>20</sup> Anto Athoillah, Dasar-dasar Manajemen (Bandung : Pustaka Setia, 2010),h.96

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.1.

Keempat fungsi dasar itu dianggap sangat fundamental dalam setiap manajemen atau yang dikenal dengan singkatan POAC. Cakupan fungsi dasar yang diajukannya sangat luas sifatnya, sehingga dapat memberikan pengertian secara implicit dalam konsep-konsep manajemen yang disampaikan oleh para ahli lainnya. Misalnya konsep coordinating dari Fayol telah dianggap sudah dalam keempat fungsi dasar G.R Terry.<sup>22</sup>

#### 1) Planning (perencanaan)

Dalam QS Shad 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (QS Shaad 27).<sup>23</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa segala sesuatu pasti sudah direncanakan beserta manfaat/hikmanya. Planning (perencanaan) merupakan fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena organizing, actuating dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan, dan juga merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>24</sup>

#### 2) *Organizing* (pengorganisasian)

<sup>22</sup> Geogre R. Terry Leslie W. Rue, dasar-dasar manajemen, (jakarta:BumiAksara, 1990 ), h. 9

<sup>23</sup> Departemen Agama RI,al-Quran dan terjemahannya, h. 1

<sup>24</sup> Usman Effendi, Asas Manajemen (Depok: PT. Raja Grafindo, 2014),h.3.

George R. Terry mengatakan bahwa pengeorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh keputusan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu pengorganisasian juga merupakan:

- a) Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) Perancang dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.<sup>25</sup>

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah di tetapkan serta menganggapi tujuan organisasi. Organizing mengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.<sup>26</sup> Penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ajaran islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasian dengan rapi.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:”*Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan perbuatan yang terutam*

<sup>25</sup> Didin Hafiduddin, Manajemen Syariah (Jakarta : Gema Insani,2003),h.100.

<sup>26</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2013), h.9.

*dilakukan dengan itqan (kesungguhan dan keseriusan) (HR. Thabrani).”*

Dari penjelasan diatas bahwa keseriusan dan kesungguhan mengorganisir sangat dianjurkan oleh Islam.<sup>27</sup>

### 3) *Actuating* (Pelaksanaan dan pengarahan)

*Actuating* yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya. Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang kokret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervise, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap kelompok.<sup>28</sup>

George R. Terry mengatakan bahwa penggerakan adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggotanya tersebut, oleh karena itu para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.<sup>29</sup>

Jadi penggerakan (*actuating*) dapat diartikan sebagai satu tindakan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.100.

<sup>28</sup> Usman Effendi, Asas Manajemen (Jakarta: Raja Gafrindo Persada, 2014), h.116

<sup>29</sup> Sondang P. Siagian, Manajemen Statistik (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h.257

usaha-usaha organisasi, dalam hal ini sebagai upaya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

#### 4) Controlling (Pengawasan)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*Actuating*), dilapangan sesuai dengan (rencana), yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*Goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.<sup>30</sup> Chuck Williams mengatakan bahwa pengawasan adalah peninjauan kemajuan terhadap pencapaian hasil akhir dan pengambilan tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud.<sup>31</sup>

Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi kearah tujuan yang ditetapkan. *Controlling* dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.<sup>32</sup>

#### c. Landasan Indikator Moral Manajemen Syariah

---

<sup>30</sup> Sentot Herman, Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen korporasi, jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 2 Nomor 1, Edisi 1 Maret 2010, h.19

<sup>31</sup> Chuck Williams, Manajemen (United States of America: South-Western College Publishing, 2000), n.7

<sup>32</sup> Syamsir Torang, Organisasi dan Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2016),h.176

Menurut Didin Hafidhuddin manajemen syariah adalah perilaku terkait dengan nilai-nilai keimanan, dan ketauhidan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>33</sup> Dimana dalam pelaksanaannya terdapat indikator nilai-nilai moral yang harusnya diterapkan agar kinerja manajemen suatu organisasi dapat berjalan secara tepat dan benar. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Dimana pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas dalam islam terujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggung jawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarakan hukum yang telah diterapkan sebelumnya seperti peraturan desadan prinsip-prinsi syariah.<sup>34</sup>

2) Trasparansi

Prinsip ini merupakan petunjuk untuk memberikan semua rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam hal laporan keuangan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, “*Manajemen Syariah dalam Praktek*”, (Jakarta:Gema Insani, 2002), h.28

<sup>34</sup> Onsardi, Marini dan Ezizia Selvia, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Hukum Palik Kabupaten Bengkulu Utara,*( Jurnal :Universitas Muhammadiyah Bengkulu),h.7

<sup>35</sup> Henny Sri Astuty, *Praktek Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula*, (Sleman:Deepublish, 2019) h.1

## 2. Teori Pengelolaan

### a. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan mengatur, dan mengusahkan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>36</sup> Dalam Bahasa Arab, istilah pengelolaan disepadankan dengan kata *an-nizham* atau *at-tanzham*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu pada tempatnya. Istilah ini tidak ditemukan dalam kamus *AlMunawir*, tetapi kata-kata yang akar katanya dalam bentuk *fi'il madhi* yakni *nazhzhahama*, artinya menyusun, mengatur, merangkai. Akar kata lainnya adalah *intazhzhama*, artinya menjadi tersusun, teratur, terangkum: *almunazhzhama*=*al-murattab*, artinya yang teratur-rapi.<sup>37</sup>

Pengelolaan adalah proses penetaan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Hal ini didukung oleh pendapat alam alam yang menggunakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk

<sup>36</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempore (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 695

<sup>37</sup> Husaini Usman, Pengelolaan: Teori, Praktik & Riset Pendidikan Edisi 4, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 6

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian Suprianto dan Muhsin mengatakan bahwa pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil/tujuan yang direncanakan.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Kiyosaki dan Lechter bahwa pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi.<sup>39</sup>

Menurut Hamidi dan Lutfi pengelolaan didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasional atau lembaga.<sup>40</sup> Lebih lanjut Hasibun mengatakan bahwa pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>41</sup> Sudirman memandang bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota.<sup>42</sup> Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> Supriyanto, Muhsin. *Teknologi Informasi Perpustakaan*. Yogyakarta: Kanisius. 2008, h. 142

<sup>39</sup> Kiyosaki, Lechter, *Rich Dad's Who Took My Money*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.104

<sup>40</sup> Hamidi, Lutfi. *Antara Realitas Politik dan Implimentasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010. h. 153

<sup>41</sup> Hasibun, Malyu SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006. h.2

<sup>42</sup> Sudirmna, *Manajemen Sekola Dasar*. Jakarta: Harapan Ilmu, 2009, h.25

<sup>43</sup> Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Jakarta: PT Rineka Cipta. h.31

## b. Fungsi-fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:

### 1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.<sup>44</sup>

### 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pegelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Adisamita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

<sup>45</sup> Susilo Martoyo, SE, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: BPFE), h.89

### 3) Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawai, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka, *actuating* atau juga disebut “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai.<sup>46</sup>

### 4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip telah ditetapkan.<sup>47</sup>

## 3. Teori Dana Desa

### a. Pengertian Dana Desa

Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk untuk suatu keperluan.<sup>48</sup> Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata *Swadesi* ( bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

<sup>46</sup> Susilo Martoyo, SE, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: BPFE), h.116

<sup>47</sup> Sofyan Syafri, *Manajemen Kontenporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 282

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), h.314

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>49</sup>

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3, dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa, DanaDesa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan diteransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.<sup>50</sup>

Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandate UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan bentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka Dana Desa akan terus menerus dialokasikan oleh pemerintah. Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun

---

<sup>49</sup> Syafrudin, Ateng dan Na'a Suprin. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen dalam Desain Otonomi Desa*. (P.T. Alumn, Bandung: 2010), h. 3.

<sup>50</sup> Sutoro, et.Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia( Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta, 2016, h.7.

sebagaimana diamatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.<sup>51</sup>

b. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan dana desa melalui RKUD. Dalam hal ini daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan dana desa kepada desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan dana perimbangan tahun berikutnya.<sup>52</sup>

Pemerintah menetapkan pagu dana desa di dalam jenis belanja transfer ke daerah dan desa, pada kelompok belanja negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu dana desa untuk Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembangian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari pengaturan presiden tentang penjabaran APBN.<sup>53</sup> Berdasarkan Pasal 1 peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dana transfer desa dana transfer adalah dana yang bersumber dari dana desa, dana bagi hasil, pajak dan retribusi daerah, DD, dan bantuan keuangan yang diteransfer ke rekening pemerintah desa.

---

<sup>51</sup> Sutoro, et. Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*, h. 7

<sup>52</sup> Sutarno, et. Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*, h. 16

<sup>53</sup> Icku Rangka Bawono, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019). h.34

selanjutnya dalam pasal 2 peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dana transfer desa, dikemukakan bahwa tujuan pembagian dana desa transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga melalui DD, desa berpeluang meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dana transfer dikelola dengan tahap yang sesuai pasal 93 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V peraturan Menteri dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dijelaskan bahwa:

- 1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh sekertaris desa dan disampaikan kepada kepala desa yang kemudian dibahas bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalu rekening desa yang harus didukung oleh bupati yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana

anggaran biaya yang mengharuskan mengajukan surat permintaan pembayaran.

- 3) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada kepala desa
- 4) Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan kepala desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
- 5) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, format laporan kekayaan milik desa, dan format laporan pemerintahan dan pemerintah daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.<sup>54</sup>

Pemerintah kemudian menyalurkan dana desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Perdana tentang APBD Kabupaten/Kota
- b) Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa

---

<sup>54</sup> M. Ridwan Tikollah dkk, *JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan: Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*, Vol 1 nomor 1 januari 2018, h. 88-89

- c) Laporan realisasi penyaluran dana konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.<sup>55</sup>

c. Program Dana Desa

Program/perencanaan (*planning*) yaitu fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis, perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan di ketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah memilih. Artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternative yang ada. Tanpa alternative, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan.<sup>56</sup> Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Dana Desa', *Tersedia Pada: [Http://kppnmetro. Org/Dana-Desa](http://kppnmetro.org/dana-desa)*, 2014. h. 29

<sup>56</sup> Malayu s.p. Hasibun, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 91

<sup>57</sup> Sri Wahyuni Nur and F Fitri, 'Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros', *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3.1 (2019), 1–9.

Sementara itu menurut Jones Program adalah terjemahan dari dokterin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energy-energi dan sumber-sumber daya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern.<sup>58</sup> Namun kita sebagai umat muslim memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan daripada pendapat pakar perencanaan tersebut, Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah lanjut berbagai macam permasalahan hidup, begitupun dengan perencanaan.<sup>59</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia dan menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu:

- 1) Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur.
- 2) Program harus dapat dipergunakan sebagai alternative untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran.

---

<sup>58</sup> E Suparman, 'Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara' (Tanjungpura University, 2014). h.4

<sup>59</sup> Abu Usmanh Abdurrahmah, Perencanaan dalam Kaidah Islam, (On-line), tersedia di: <https://www.islam.wordpress.com/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-islam/>(14 Juni 2017)

3) Program dapat dihitung secara analisis cost benefit. Jadi kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat diukur outputnya.<sup>60</sup>

Program DD merupakan paket kegiatan yang bertujuan membantu pemerintah desa, yang mempunyai prinsip pengelolaan sebagai berikut, yaitu:

- a) pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam APBDDesa.
- b) seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c) seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- d) dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.<sup>61</sup>

#### d. Prioritas Pembangunan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri desa, pembanguna daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015 pengaturan proritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

---

<sup>60</sup> Nyimas Latifah Letty Aziz and R Siti Zuhro, *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). h. 71

<sup>61</sup> [http://www.academia.edu/5218236/Jurnal\\_Alokasi\\_Dana\\_Desa](http://www.academia.edu/5218236/Jurnal_Alokasi_Dana_Desa)

- 1) Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hal asal usul dan kewenangan local berskala desa dibiayai oleh dana desa.
- 2) Sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa.
- 3) Acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.<sup>62</sup>

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada perinsip-perinsip:

- a) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; (Inklusif).
- b) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.<sup>63</sup>

#### 4. Teori Kesejahteraan Masyarakat

##### a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan secara bahasa, aman, sentosa, dan makmur. Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.<sup>64</sup>

Kesejahteraan menurut ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan

<sup>62</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, and R I Transmigrasi, 'Prioritas Penggunaan Dana Desa' (Jakarta, 2018).

<sup>63</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021). h. 20-21

<sup>64</sup> W.J.S Purwadinata, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan, 1996), 126

adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.<sup>65</sup>

Menurut Kolle dalam bukunya Bintaro, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- 2) dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- 3) dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- 4) dengan melihat kualitas hidup dari spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.<sup>66</sup>

#### b. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>67</sup> Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam

---

<sup>65</sup> Undang-undang no 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal I Angka 31

<sup>66</sup> Bintaro, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h.54

<sup>67</sup> Badrudin, Rudy, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN 2021), h.146

perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembangian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.<sup>68</sup>

Tadaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terntasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.<sup>69</sup>

#### c. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan satu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.<sup>70</sup>

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tersermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan

<sup>68</sup> Sudarsono, Pengantar Ekonomi Mikro, (Jakarta: LP3ES, 1982)

<sup>69</sup> Tudaro P Michael, Smith C Stphen, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta 2003, h.19

<sup>70</sup> Adiwarmann A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.10

utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>71</sup>

Berikut beberapa penjelasan kesejahteraan masyarakat menurut organisasi-organisasi sosial.

1) Badan perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS)

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.<sup>72</sup>

2) Biro pusat statistik (BPS)

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga/rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan setiap

---

<sup>71</sup> A. Hukum, Pengaruh Kjarja Keuangan Daerah, Kenerja Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, (2016)

<sup>72</sup> Hendrik Hendrik, 'Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar Dan Danau Bawah Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau', *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 16.01 (2011), 21–32.

hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin/tidak sejahtera.<sup>73</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik dalam mengukur tingkat kesejahteraan bisa dilihat melalui 7 indikator, yaitu:

- a) Kependudukan
- b) Pendidikan Terdapat tiga indikator yang bisa diperhatikan yaitu:
  - (1). Angka Partisipasi Sekolah.
  - (2). Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan
  - (3). Angka Buta Huruf.
- c) Kesehatan Terdapat tiga indikator yang dapat dilihat (1). Angka Kesakitan. (2). Penolong Kelahiran. (3). Angka Harapan Hidup.
- d) Fertilitas dan Keluarga Berencana
- e) Pola Konsumsi
- f) Ketenagakerjaan Status pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis yaitu, berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas dan pekerja keluarga.

---

<sup>73</sup> Mohtar Hendrik, 'Kajian Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Dayun, Propinsi Riau', *Jurnal Teknologi*, 16.2 (2017), 2087–91.

g) Perumahan.<sup>74</sup>

Dari pemikiran-pemikiran diatas maka dalam kesejahteraan masyarakat yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indikator - indikator yang terus dikembangkan diharapkan mampu membawa korelasi positif kesejahteraan dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan pembangunan harus fokus pada seluruh aset bangsa. Hasil daripembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian kerja berembang.<sup>75</sup>

## 5. Teori Implikasi

### a. Pengertian implikasi

Implikasi adalah suatu efek atau akibat yang di dapatkan apabila obyek di berikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja serta dampak dari ini akan bisa di lihat dalam jangka waktu tertentu. Mekan dari itu istilah tersebut akan ada dalam sebuah laporan penelitian khususnya karena akan memberikan suatu hasil yang di inginkan maupun yang di harapkan bagi pemerdaya.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Wawan Oktriawan, Adriansah Adriansah, and Siti Alisa, 'Artikel Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Campakasari Kecamatan Cempaka Purwakarta: Kesejahteraan', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 3.1 (2022), 1–14.

<sup>75</sup> Anita Wulandari, Pelaksanaan Perogram Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi SI, 2017), Lampung, 2017, 54

<sup>76</sup> Wahyudiyono Wahyudiyono, 'Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial Di Jawa Timur', *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 8.2 (2019), 63–68.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana keterlibatan. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari suatu implikasi seperti kata implisit yang artinya membawa hubungan keterlibatan atau keterlibatkan dengan sesuatu.<sup>77</sup> Berikut ini merupakan beberapa pengertian implikasi menurut para ahli, yaitu:

- 1) Menurut Islamy, Implikasinya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan tertentu.
- 2) Silalahi, Implikasi merupakan suatu pertimbangan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan lainnya mengenai masalah pihak yang terlibat.
- 3) Winarno, Implikasi merupakan suatu pertimbangan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan lainnya mengenai masalah pihak yang terlibat.<sup>78</sup>

Dalam implikasi ada 2 jenis implikasi yang ada pada bidang penelitian yaitu:

- a) Teoritis, Jenis teoritis yaitu sebuah kajian yang mendasar untuk mendukung tentang adanya penelitian yang juga memungkinkan untuk dapat dilakukan. Biasanya jenis teoritis biasa digunakan untuk meyakinkan orang.

---

<sup>77</sup> Muhammad Qustulani, 'Implikasi Shalat Terhadap Pendidikan Moral Dalam Islam', *Fikrah*, 6.1 (2013).

<sup>78</sup> Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): 42–43.

b) Manajerial, Jenis ini yaitu sebuah kebijakan yang di dalamnya terdapat sebuah objek yang sedangkan di lakukan atau di teliti.<sup>79</sup>

Kebijakan ini biasanya berupa kode etik yang harus dapat di teliri serta ada 2 jenis kebijakan yakni:

- Procedural, yaitu analisis, perencanaan kerja, pelihan kebijakan, dan prosedur analisi.
- Substantive, yaitu perkiraan rencana dan perumusan suatu tindakan.<sup>80</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna, maka dari itu peneliti memberi penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Implikasi

Implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.

#### 2. Pengelolaan

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan penggunaan

---

<sup>79</sup> Kenny Jaya Adinata and Ni Nyoman Kerti Yasa, 'Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Harga, Dan Sikap Terhadap Niat Beli Kembali Di Situs Lazada' (Udayana University, 2018).

<sup>80</sup> Riyan Dhana, 'Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir' (Universitas Islam Riau, 2022).

sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

### 3. Dana Desa

Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata *Swadesi* ( bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

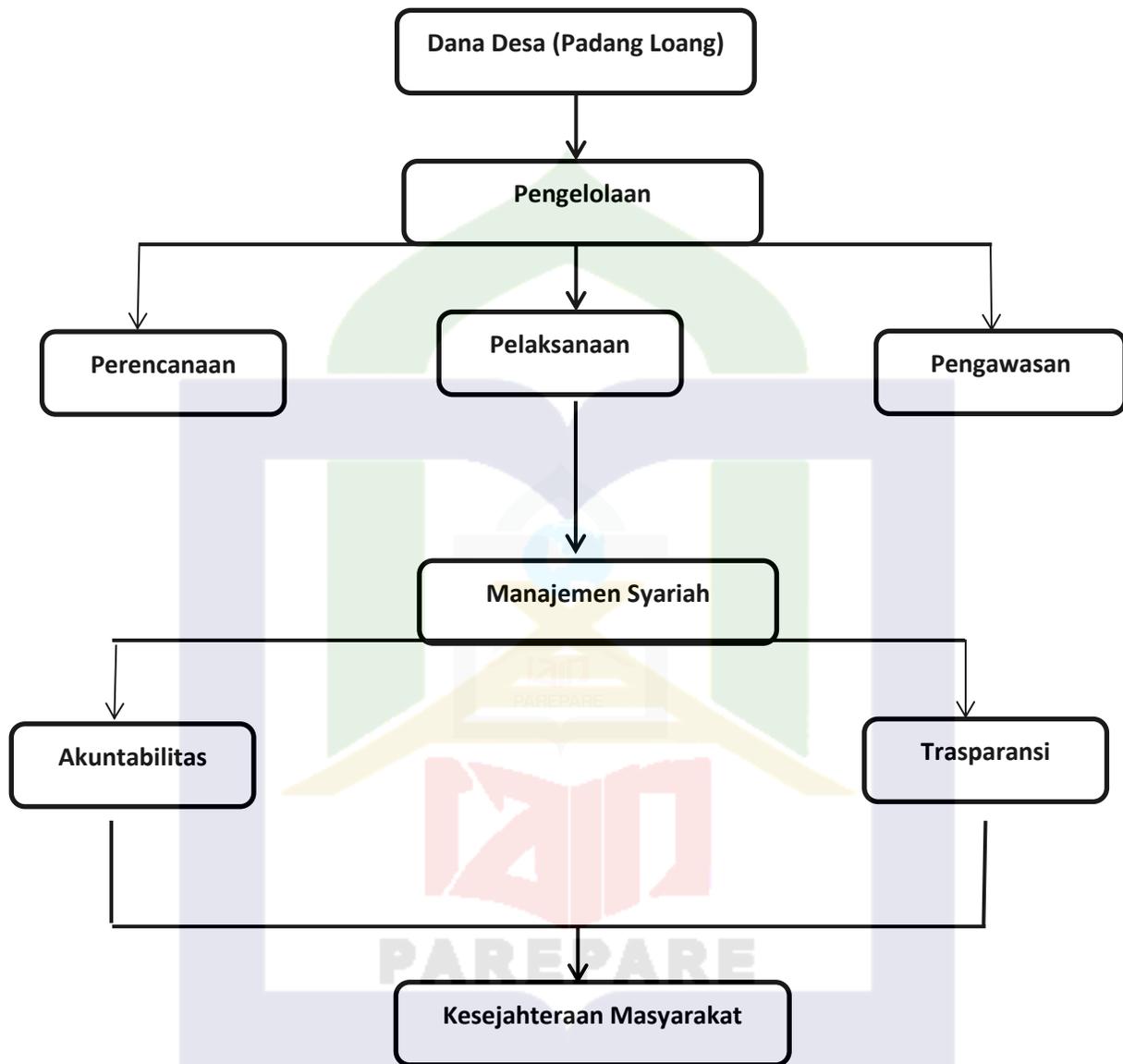
### 4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tersermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

### 5. Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, jika setiap orang perilaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali.

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Pikir Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, ataupun di lembaga-lembaga pemerintah.<sup>81</sup> Berdasarkan masalahnya, penelitian digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi.<sup>82</sup> Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Padang Loang Kabupaten Wajo ditinjau dari sisi manajemen syariah tersebut.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Wajo tepatnya di Desa Padang Loang, dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

---

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.29

<sup>82</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*, (Yogyakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2013), h.12.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Implikasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo yang mana apakah dalam pengelolaannya telah memenuhi standar manajemen syariah.

### D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan.<sup>83</sup> Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau dengan melalui perekaman video/audio, pengambilan foto. Sumber tertulis dapat berupa sumber dari arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering diatasi secara induktif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu Desa Padang Loang Kabupaten Wajo melalui wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>83</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.97

## 2. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.

## E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>84</sup> Teknik observasi dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung tentang Implikasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat di Desa Padang Loang Kabupaten Wajo tentang Implikasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo( Tinjauan Manajemen Syariah). Jumlah informan sebanyak 12 orang.

---

<sup>84</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.154.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan implikasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat.

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-ha yang penting. Data hasil mengikhtarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan Peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

## 3. Penyimpulan dan Verifikasi Kegiatan

penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> V. wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & EKonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 34.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pengelolaan Dana Desa Padang Loang

Pengelolaan manajemen dana desa dalam percepatan pembangunan desa di Desa Padang Loang Kabupaten wajo merupakan proses pengadialan, pengaturan, pengurusan, dan penyelenggaraan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat didesa agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku.

##### a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Desa Padang Loang Kabupaten Wajo dalam hal perencanaan APBDes tahun 2022 dari tahun 2021 atau di rencanakan dari tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBDes tahun 2022 itu diambil dari perencanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan). Rencana APBDes 2022 disusun dari tahun 2021.

Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Padang Loang Kabupaten Wajo, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang.

Bapak Mannang, SE selaku Kepala Desa, Desa Padang Loang Kecamatan Wajo menjelaskan bahwa:

“Di Desa Padang Loang ini dalam proses perencanaan pembangunan dalam pelaksana APDes juga menyusun tim khusus yang terdiri dari kepala desa selaku penanggung jawab oprasional kegiatan (PJOK), sekertaris desa selaku penanggung jawab administrasi (PJAK), bendahara desa selaku kepala urusan keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa”.<sup>86</sup>

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga, masyarakat tokoh masyarakat dan masyarakat desa.

Bapak Riska,S.Sos, selaku sekertaris Desa Padang Loang Kecamatan Wajo, menjelaskan bahwa:

“Musrembang desa dilakukan 1 tahun sekali di bulan juli. Musrembang dihadiri oleh BPD, kepala dusun dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa, sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah.”<sup>87</sup>

Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Dari hasil pengamatan peneliti untuk tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang yang telah dilaksanakan.

<sup>86</sup> Mannang, SE, “Kepala Desa Padang Loang,”*Wawancara* , Padang Loang 5 Oktober 2023

<sup>87</sup> Riska,S.Sos,”Sekertaris Desa Padang Loang”,*Wawancara*, Padang Loang 4 Oktober 2023

Hasil ini disampaikan oleh Bapak Kambe dan Bapak Cadde selaku masyarakat Desa Padang Loang melalui kutipan berikut ini.

“Pada proses perencanaan penggunaan dana desa kami dilibatkan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk pengalokasian perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya musyawarah diharapkan akan mampu memfasilitasi kebutuhan kami, terutama kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat.”<sup>88</sup>

“kami sebagai warga akan selalu memberikan masukan berupa usulan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, dan tentu akan dipilih kembali kegiatan mana yang akan disetujui oleh aparat desa. kami berharap dengan sumbangsih usulan dari warga akan mampu meningkatkan kesejahteraan kami.”<sup>89</sup>

Berikut hasil wawancara peneliti kepala Desa, Desa Padang Loang Kabupaten Wajo yaitu Bapak Mannang, SE mengenai bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut:

“Perencanaan APBDes tahun 2021 sudah dilakukan ditahun sebelumnya yaitu tahun 2020, berikut juga untuk tahun 2022 itu dilakukan di tahun 2021, pada perencanaan tahun 2020 ini tentunya kami mengadakan musrembang desa dengan mengundang masyarakat Desa Padang Loang untuk berpartisipasi, akan tetap pada kenyataan yang terjadi di lapangan banyak masyarakat yang tidak hadir, pada umumnya masyarakat yang hadir hanya perwakilan dari setiap dusun dan beberapa tokoh agama, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Ketika tahun 2021 pembangunan desa dimulai, pada awal pembangunan kami mulai dari perbaikan dan pemeliharaan jalan nah di dari sinilah suda mulai timbul keingintahuan masyarakat terkait dengan dana desa dan bangunan. Mereka sudah mulai bertanya-tanya selain jalan fasilitas apa saja yang nantinya akan di bangun desa dan dari mana asal dananya. Karena masyarakat sudah banyak yang mulai paham tentang dana desa dan proses pembangunan desa jadi untuk kegiatan musrembang yang dilakukan di tahun berikutnya sudah mulai banyak masyarakat yang turut serta berpartisipasi menghadiri musrembang sekaligus juga

<sup>88</sup> Kambe, "Masyarakat Desa Padang Loang," *Wawancara*, 23 September 2023

<sup>89</sup> Cadde, Masyarakat Desa Padang Loang, *Wawancara*, 23 September 2023

memberikan masukan-masukan terkait pembangunan yang akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya.”<sup>90</sup>

Suda sangat jelas bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (PerDes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilakukan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Kepala Desa Padang Loang Mannang, SE mengemukakan bahwa:

“Penggunaan dan desa tersebut harus mengacu pada perbup, sehingga dengan diterimanya dan tersebut desa membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun program yang telah kami bangun seperti pengadaan lampu jalan, pengadaan jambang keluarga, pengadaan POSDes, pengerasan jalan.”<sup>91</sup>

Setelah melakukan musrembang, langkah selanjutnya adalah penyusunan RKPDes, dimana didalam RKPDes termuat segala rencana kerja pemerintah desa pada tahun anggaran. RKPDes disusun berdasarkan kesepakatan hasil musrembang. Setiap daftar usulan dipilah dan dipilih mana yang akan menjadi prioritas penganggaran pada tahun anggaran berjalan.

#### b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Desa Padang Loang adalah desa luas wilayah sekitar 1.851 Ha, yang terdiri dari 4 dusun . Desa Padang Loang yang sebaran jumlah penduduknya tertolong padat. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang tercatat adalah mencapai 300 KK dengan jumlah jiwa mencapai 1.029 jiwa

<sup>90</sup> Mannang,SE, “Kepala Desa Padang Loang”, *Wawancara* 5 Oktober 2023

<sup>91</sup> Mannang,SE, “Kepala Desa Padang Loang”, *wawancara*, Padang Loang 5 Oktober 2023

yang terdiri dari 497 Jika adalah laki-laki dan 532 jiwa adalah perempuan . Padang Loang Kabupaten Wajo pada tahun 2020 mendapat total pendapatan sebesar Rp 1.228.575.155,24.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Padang Loang Kabupaten Wajo digunakan untuk 4 Bidang. Yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp.458.894.492,24. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.436.975.245,00. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 33.000.000,00. Bidang penyalanggunaan bencana, darurat sebesar Rp. 367.400.000,00.<sup>92</sup>

Tabel 4.1 Pendapatan dan pengeluaran dana desa tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Pedapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Dana Desa	759.856.000,00	
2.	Bagi Hasil pajak dan Restribusi	26.745.555,24	
3.	Alokasi Dana Desa	429.191.200,00	
4.	Bantuan Keuangan Kab upaten/Kota	12.782.400,00	
	Bidang Penyelenggaraan Pernerinta Desa		458.894.492,24
6.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		436.975.245,00
7.	Bidang pembinaan Kemasyarakatan		33.000.000,00
8.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		367.400.000,00
	Jumlah	1.228.575.155,24	1.228.575.155,24

Sumber: Kantor Desa Padang Loang

<sup>92</sup> Laporan Realisasi APBDes tahun 2020

Untuk penggunaan pendapatan dana desa pada tahun anggaran 2020 dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang IV Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi Bidang I Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	413.329.734,24
2..	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	45.564.758,00
Jumlah		458.894.492,24

*Sumber: Kantor Desa Padang Loang*

Tabel 4.3 Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Sub Bidang Kesehatan	4.8000.000,00
2.	Peningkatan belai desa	409.625.245,00
3.	Pengadaan lampu jalan	5.000.000,00
3.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	17.550.000,00
Jumlah		436.975.245,00

*Sumber: Kantor Desa Padang Loang*

Tabel 4.4 Realisasi Bidang III Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran(Rp)
1.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.000.000,00
Jumlah		33.000.000,00

*Sumber: Kantor Desa Padang Loang*

Tabel 4.5 Realisasi Bidang IV Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00
2..	Sub Bidang Keadaan Mendesak	347.400.000,00
Jumlah		367.400.000,00

*Sumber: Kantor Desa Padang Loang*

Sedangkan pada tahun 2021 Desa Padang Loang Kabupaten Wajo mendapatkan total pendapatan sebesar Rp. 1.162.137.283,00 yang diperoleh dari pendapatan dan transefer tersendiri dari Dana Desa sebesar Rp. 688.966.000,00, dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 25.016.683,00, dan dari alokasi dana desa sebesar Rp 448.154.600,00.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa sumber baru digunakan untuk 5 bidang. Yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp 488.970.141,00, dan Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp 273.185.665,00, dan Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 30.000.000,00, dan Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 23.465.000,00, dan Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp 368.317.280,00.<sup>93</sup>

Tabel 4.6 pendapatan dan pengeluaran dana desa tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Pedapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Dana Desa	688.966.000,00	
2.	Bagi Hasil pajak dan Restribusi	25.016.683,00	
3.	Alokasi Dana Desa	448.154.600,00	
4..	Bidang Penyelenggaraan Penerinta Desa		488.970.141,00
5.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		273.185.665,00
6.	Bidang pembinaan Kemasyarakatan		30.000.000,00
7.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		23.465.000,00
8.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan		368.317.280,00

<sup>93</sup> Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021

	Mendesak Desa		
	Jumlah	1.162.137.283,00	1.162.137.283,00

*Sumber: Kantor Desa Padang Loang*

Untuk penggunaan pendapatan dana desa pada tahun anggaran 2021 dibagi menjadi empat bidang I Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III Pembinaan Masyarakat, Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang V Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Realisasi Bidang I Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintahan Desa	420.838.700,00
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.431.439,00
3.	Pengelolaan Administrasi	26.000.000,00
4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, keuangan dan pelaporan	2.700.002,00
5.	Sub Bidang Pertahanan	2.000.000,00
	Jumlah	488.970.141,00

*Sumber: Kantor Desa Padang Loang*

Tabel 4.8 Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Sub Bidang Pendidikan	18.835.000,00
2.	Sub Bidang Kesehatan	27.782.578,00
3.	Pengerasan jalan tani	165.238.787,00
4.	Pengerasan jalan desa	29.429.300,00
5.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	31.900.000,00
	Jumlah	273.185.665,00

*Sumber: Kantor Desa Padang Loang*

Tabel 4.9 Realisasi Bidang III Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.000.000,00
Jumlah		30.000.000,00

*Sumber: Kantor Desa Padang Loang*

Tabel 4.10 Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.965.000,00
2.	Sub Dukungan Penanam Modal	5.500.000,00
Jumlah		23.465.000,00

*Sumber: Kantor Desa Padang Loang*

Tabel 4.11 Realisasi Bidang V Penanggulangan Bencana, Darurat dan Menesak Desa Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	55.117.280,00
2.	Sub Bidang Mendesak	313.200.000,00
Jumlah		368.317.280,00

*Sumber: Kantor Desa Padang Loang*

Untuk tahun 2022 Desa Padang Loang Kabupaten Wajo mendapat total Pendapatan sebesar Rp 1.403.728.900,00. Yang diperoleh dari pendapatan dana desa sebesar Rp 925.122.000,00, dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 449.192.300,00, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 29.414.600,00.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Padang Loang digunakan untuk 5 Bidang. Yaitu Bidang penyelenggaraan Pemerintah sebesar Rp.474.128.728,00, Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp 463.410.157,00, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 34.431.027,00, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 35.057.000,00, dan Bidang

Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak sebesar Rp 488.009.760,00.<sup>94</sup>

Tabel 4.12 pendapatan dan pengeluaran dana desa tahun 2022:

No	Uraian Kegiatan	Pedapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Dana Desa	925.122.000,00	
2.	Bagi Hasil pajak dan Restribusi	29.414.600,00	
3.	Alokasi Dana Desa	449.192.300,00	
4.	Bidang Penyelenggaraan Pernerinta Desa		474.128.728,00
5.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		463.410.157,00
6.	Bidang pembinaan Kemasyarakatan		34.431.027,00
7.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		35.067.000,00
8.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		488.009.760,00
Jumlah		1.403.728.900,00	1.403.728.900,00

*Sumber: Kantor Desa Padang Loang*

Untuk penggunaan pendapatan dana desa pada tahun anggaran 2022 dibagi menjadi lima yaitu Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III Pembinaan Kemasyarakat, Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang V Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

<sup>94</sup> Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022

Tabel 4.13 Realisasi Bidang I Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Penyalenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintahan Desa	407.458.000,00
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.948.900,00
3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	13.702.028,00
4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, keuangan dan pelaporan	18.819.800,00
	Sub Bidang Pertahanan	3.200.000,00
Jumlah		474.128.728,00

Sumber: Kantor Desa Padang Loang

Tabel 4.14 Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Sub Bidang Pendidikan	79.413.915,00
2.	Sub Bidang Kesehatan	44.849.945,00
3.	Pengerasan jalan tani	271.673.664,00
4.	Peningkatan prasarana jala desa	67.472.633,00
Jumlah		463.410.157,00

Sumber: Kantor Desa Padang Loang

Tabel 4.15 Realisasi Bidang III Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.000.000,00
2.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.431.027,00
Jumlah		34.431.027,00

Sumber: Kantor Desa Padang Loang

Tabel 4.16 Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.557.000,00
2.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.5000.000,00
Jumlah		35.057.000,00

Sumber: Kantor Desa Padang Loang

Tabel 4.17 Realisasi Bidang V Penanggulangan Bencana, Darurat dan Menesak Desa Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	74.009.760,00
2.	Sub Bidang Mendesak	414.000.000,00
Jumlah		488.009.760,00

Sumber: Kantor Desa Padang Loang

c. Pengawasan pengelolaan dana desa

Bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan dana desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Berikut akan diuraikan kedua bentuk pengawasan tersebut.

1) Pengawasan langsung

Bentuk pengawasan langsung yang dilaksanakan adalah dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Adapun pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan dana desa, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Padang Loang, bahwa:

“dalam tahapan pelaksanaan alokasi dana desa pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa”<sup>95</sup>

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa:

“kalau dalam tahap pelaksanaan biasanya pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung kelapangan untuk memantau program penggunaan alokasi dana desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya atau tidak dan jika ada hal-hal yang kami temukan dilapangan tidak sesuai

<sup>95</sup> Iwan Paki, “ketua BPD Desa Padang Loang” Wawancara, Padang Loang, 24 September 2023

maka kami akan langsung menyampaikan kepada pemerintah desa”<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalagunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan bukan sebatas untuk membantu dalam perealisasiannya saja tetapi untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga bisa terlaksana dengan baik dan terdapat sasaran, sebagaimana yang di katakana oleh ketua BPD Desa Padang Loang, bahwa:

“mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat di dalamnya”<sup>97</sup>

## 2) Pengawasan Tidak Langsung

Bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan adalah mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Pelaporan Pertanggungjawaban

<sup>96</sup> Andi Made Ali, "Sekertaris BPD Desa Padang Loang, *Wawancara* 24 September 2023.

<sup>97</sup> Iwan Paki, "Ketua BPD Desa Padang Loang, *Wawancara* 24 September 2023.

penggunaan Dana Desa ini menyatu dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga format pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti penunjang dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Padang Loang disusun oleh bendahara desa sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Padang Loang, bahwa:

“Pembuatan laporan pertanggungjawaban disusun oleh bendahara desa yang dibantu oleh pendamping desa, kemudian laporan itu akan disampaikan kepada Bupati melalui pihak kecamatan dan ada juga yang diberikan kepada BPD, pelaporannya itu pada akhir tahun”.<sup>98</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun sebelumnya oleh bendahara desa yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada BPD, penyusunan laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun anggaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Padang Loang bahwa:

“Untuk bentuk laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada kami itu bentuknya laporan tertulis yang dimana itu berisikan laporan program yang telah dilaksanakan pemerintah desa, biasanya itu diserahkan kepada kami melalui rapat yang diadakan di akhir tahun”<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Mannang SE, “Kepala Desa Padang Loang”, *Wawancara* 5 Oktober 2023.

<sup>99</sup> Iwan Paki, “Ketua BPD Desa Padang Loang”, *Wawancara* Padang Loang, 24 September 2023

## 2. Pengelolaan dana desa dalam manajemen syariah di desa Padang Loang

### a. Antuntabilitas

Seperti yang dikatakan oleh Sekertaris Desa Padang Loang mengenai amanah dalam pengelolaan dana desa;

“Kami dari pemerintah Desa Padang Loang selalu berusaha jujur dalam melakukan pengelolaan dana desa, mulai dari pemasukan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Dimana bendahara desa selalu mencatat yang sebenar-benarnya. Dana desa yang dikelola selau digunakan untuk kepentingan masyarakat dan Desa”.<sup>100</sup>

Selanjutnya harus mempunyai sifat amanah yang artinya dapat dipercaya. Wawamcara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan Desa Padang Loang yang mengatakan bahwa;

“Kami dari pemerintah Desa Padang Loang terus berusaha semaksimal mungkin amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Supaya masyarakat percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan untuk memberdayakan masyarakat dan menjadikan Desa Padang Loang menjadi lebih baik kedepannya. Yang dapat dipercaya”.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintah yang baik harus amanah terdapat dipercaya dan pemerintah desa Padang Loang sejauh ini sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan amanah.

### b. Transparan

Seperti yang dikatakanoleh Sekertaris Desa Padang Loang mengenai sifat tabligh dalam pengelolaan dana desa;

“Untuk membangun pemerintah yang tabligh , pemerintah desa selalu berusaha menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam pelaporan terkait keuangan desa Padang Loang. Misanya, ada info atau berita dari Kabupaten/Kecamatan. Kami selaku

<sup>100</sup> Riska, S.Sos, “Sekertaris Desa Padang Loang”, *Wawancara*, 4 Oktober 2023

<sup>101</sup> Andi Hasriana, ”Bendahara Desa Padang Loang”, *Wawancara* 23 September 2023

pemerintah desa Padang Loang harus menyampaikan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat desa Padang Loang. Karena demi membangun desa Padang Loang sesuai dengan visi misi Desa Padang Loang”.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintah yang tabligh adalah yang baik yang menyampaikan apa yang sudah seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Dan pemerintah desa Padang Loang sejauh ini sudah tabligh dalam menjalankan tugasnya.

### 3. Implikasi dalam pengelolaan dana desa di desa Padang Loang terhadap kesejahteraan masyarakat

Dalam pengelolaan implikasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi sebagai berikut:

#### a. Internal

Tabel 4. 18 Rencana kerja pemerintah desa

No	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi
1.	Pemeliharaan jalan usahatani	1.599	Meter	Dusun Padang Loang
2.	Pembangunan rabat beton	1.999	Meter	Dusun Dekoe
3.	Perintisan jalan tani	2.320	Meter	Dusun Dekoe
4.	Pemeliharaan lampu jalan	140	Unit	
5.	Rehab posyandu	1	Unit	Dusun Padang loang
6.	Jamban keluarga	111	Unit	Dusun Padang Loang

Sumber: Kantor Desa Padang Loang

#### b. Eksternal

Dilihat dari berbagai sub bidang yang ada di desa Padang Loang;

<sup>102</sup> Riska, S.Sos, “Sekertaris Desa Padang Loang”, Wawancara, 4 Oktober 2023

### 1) Sub bidang kesehatan

Adapun dalam sub bidang kesehatan meliputi penyelenggaraan posyandu, dana yang di keluarkan desa yaitu; pada tahun 2020 sebesar Rp 4.800.000,00, 2021 sebesar Rp. 27.782.578,00, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 44.849.945,00.

Berikut hasil wawancara penelitian kemasyarakatan desa, Desa Padang Loang Kabupaten Wajo yaitu Ibu Hasna menyatakan bahwa: “Adanya program tersebut kita sebagai masyarakat sangat bersyukur karena kita tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan pemeriksaan ketika kita sedang sakit dan juga bagi ibu-ibu yang memiliki anak kecil atau mami belita tidak lagi jauh untuk melakukan imunisasi.”<sup>103</sup>

### 2) Sub bidang umum

Adapun dalam sub bidang umum meliputi penyelenggaraan peningkatan belai desa, pengadaan lampu jalan, pengerasan jalan tani, pengerasan jalan desa, dana yang dikeluarkan desa yaitu; pada tahun 2020 sebesar Rp. 414.625.245,00, pada tahun 2021 sebesar Rp. 194.668.087,00, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 339.410.157,00.

Berikut hasil wawancara penelitian kemasyarakatan desa, Desa Padang Loang Kabupaten Wajo yaitu bapak Amir menyatakan bahwa:

”setelah adanya dana desa, adanya penerangan jalan yang memandai sehingga memiliki pengaruh terhadap omset penjualan saya. Karena kami sebagai pedagang biasa berangkat kepasar pada jam 03.00, dimana sebelum adanya penerangan jalan kami kadang merasa was-was.”<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Hasna, “Masyarakat Desa Padang Loang”, *Wawancara* 5 Oktober 2023.

<sup>104</sup> Amir, “Masyarakat Desa Padang Loang”, *Wawancara* 6 Oktober 2023.

Kemudian dilanjutkan oleh bapak Bahar, masyarakat desa Padang Loang menyatakan bahwa:

“sejak adanya dana desa bagi yang berprofesi sebagai petani benar-benar sangat berpengaruh karna adanya jalan tani yang dibangun membantu masyarakat setempat melakukan aktivitas ke kebun atau ke sawah dan penghasilan masyarakat juga menambah dikarenakan akses jalan yang mamadai.”<sup>105</sup>

### 3) Sub bidang kawasan pemukiman

Adapun dalam sub bidang kawasan meliputi peningkatan fasilitas jambang keluarga. Adapun dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 17.550.000,00.

Berikut hasil wawancara penelitian kemasyarakat desa, Desa

Padang Loang Kabupaten Wajo yaitu Ibu Hasna menyatakan bahwa:

“sejak adanya program tersebut saya sangat terbatu dikarenakan sebelum adanya jambang keluarga kami itu menggunakan wc yang dibuat langsung dari pemukiman tanah”.<sup>106</sup>

### 4) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan

Adapun dalam sub bidang kebudayaan dan keagamaan meliputi gaji honorer guru ngaji. Adapun dana yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 33.000.000,00, pada tahun 2021 sebesar Rp. 30.000.000,00, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,00.

Berikut hasil wawancara penelitian kemasyarakat desa, Desa Padang Loang Kabupaten Wajo yaitu Ibu Jumrah menyatakan bahwa:

“pengadaan program keagamaan sangat membantu bagi anak kami yang butuh bimbingan untuk mengenal adanya al-qur’an

<sup>105</sup> Bahar, “Masyarakat Desa Padang Loang”, *Wawancara* 6 Oktober 2023.

<sup>106</sup> Hasna, “Masyarakat Desa Padang Loang”, *Wawancara* 5 Oktober 2023

dan belajar membaca al-qur'an, yang tadinya tidak sama sekali tau huruf yang ada di alqur'an menjadi bisa."<sup>107</sup>

5) Sub bidang penanggulangan bencana

Adapun dalam sub bidang penanggulangan bencana, dana yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebesar Rp.20.000.000,00, pada tahun 2021 sebesar Rp. 55.117.280,00, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 74.009.760,00.

Berikut hasil wawancara penelitian kemasyarakatan desa, Desa Padang Loang Kabupaten Wajo yaitu Ibu Jumrah menyatakan bahwa:

“dampak dari dana tersebut tidak Nampak bagi kami”<sup>108</sup>

6) Sub bidang keadaan mendesak

Adapun dalam sub bidang keadaan mendesak meliputi bantuan langsung tunai (BLT). Adapun dana yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 347.400.000,00, pada tahun 2021 sebesar Rp. 313.200.000,00, dan tahun 2022 sebesar Rp. 414.000.000,00.

Berikut hasil wawancara penelitian kemasyarakatan desa, Desa Padang Loang Kabupaten Wajo yaitu Ibu Jumrah menyatakan bahwa:

“saat adanya bantuan itu saya tidak pernah di kasi”<sup>109</sup>

Berikut hasil wawancara penelitian kemasyarakatan desa, Desa Padang Loang Kabupaten Wajo yaitu Ibu Surianti menyatakan bahwa:

<sup>107</sup> Jumrah, "Masyarakat Desa Padang Loang." *Wawancara* 7 Oktober 2023

<sup>108</sup> Jumrah, "Masyarakat Desa Padang Loang." *Wawancara* 7 Oktober 2023

<sup>109</sup> Jumrah, "Masyarakat Desa Padang Loang." *Wawancara* 7 Oktober 2023

“Dana yang di adakan di di desa itu sangat membantu saya karna saat ini penghasilan saya tidak menentu pada saat ada dana tersebut saya sekeluarga merasa tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari saya”<sup>110</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Pengelolaan dana desa di Desa Padang Loang

Menurut Hamidi dan lutfi pengelolaan didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasional atau lembaga.<sup>111</sup> Adapun beberapa tolak ukur pengelolaan diantaranya;

#### a. Perencanaan Dana Desa

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan fisik Desa Padang Loang dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan ,jalan, pembangunan sarana puskesmas, perbaikan sarana dan prasarana, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Dana Desa (DD) dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan fisik Desa Padang Loang telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa

<sup>110</sup> Surianti, ”Masyarakat Desa Padang Loang.”*Wawancara* 10 Oktober 2023

<sup>111</sup> Hamidi, Lutfi, *Antara Realitas Politik dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010. H.153

Padang Loang yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat

b. Pelaksanaan dana desa

Dilihat dari hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan fisik Desa Padang Loang dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan dari tahun 2020 sampai 2022 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan. Pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan fisik Desa Padang Loang adalah sudah dilakukannya dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di Desa Padang Loang.

c. Pengawasan dana desa

Pengawasan yang dilakukan di Desa Padang Loang menggunakan dua metode yaitu:

1) Pengawasan langsung

Bahwa pengawasan langsung terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting dilakukan untuk memastikan agar tujuan penggunaan dana desa bisa tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan. tingkat partisipasi masyarakat di desa Padang Loang

dalam pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang hadir pada saat diadakannya kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil penggunaan Dana Desa dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa.

2) Pengawasan tidak langsung

Pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD di Desa Padang Loang. Dalam pengelolaan Dana Desa (DD), kepala desa memberikan laporan tertulis yang memuat laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dilaksanakan selama satu tahun, pemberian laporan ini sebagai bentuk kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan segala kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan desa. Pengawasan terhadap dana desa ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

## 2. Pengelolaan dana desa dalam manajemen syariah di Desa Padang Loang

Islam mengajarkan tentang betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk pengelolaan dana desa. berdasar pada perinsip manajemen syariah tentang pengelolaan dana desa di Desa Padang Loang sudah sesuai dengan sifat Nabi Muhammad Saw. Yaitu Siddiq (Jujur), Fathanah (Cerdas), Amanah (Terpercaya) dan Tabliq (Transparan).<sup>112</sup>

Dalam mensejahterakan masyarakat sangat membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung kesejahteraan desa agar masyarakat Desa Padang Loang akan memberikan peluang usaha bagi masyarakat Desa Padang Loang agar menekan jumlah masyarakat miskin di Desa Padang Loang.

### 3) Akuntabilitias

Akintabilitas dalam prespektif manajemen syariah yaitu harus mempunyai sifat sidiq yaitu artinya kejujuran, tulus. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Dapat dibayangkan jika pemimpin sebuah organisasi, masyarakat atau negara. Tidak mempunyai kejujuran tentu orang-orang yang dipimpin (masyarakat) tidak akan punya kepercayaan, jika demikian yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Karena itu, akuntabilitas menjadi sangat penting dalam membangun *good governance*. Akuntabilitas dalam hal ini kejujuran merupakan bagian dari prinsip muamalah islami.

---

<sup>112</sup> Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, “Manajemen Syariah dalam Praktek”, (Jakarta:Gema Insani, 2002)h.23.

Dalam prespektif syariah menjelaskan bahwa umat manusia wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Allah sebagai pemberi amanah, kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah dalam Qs.An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahannya:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengarkan lagi Maha Melihat”.<sup>113</sup>

Ayat tersebut mengandung arti bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan dalam hal melaksanakannya, penerima amanah harus berlaku adil dalam menyampaikan kebenaran. Maka pemerintah desa harus menyampaikan pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Karena amanah tersebut anak juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt, karena Allah Maha Mengetahui.

Berdasarkan hasil penelitian dapat mewujudkan pemerintah yang jujur, pemerintah Desa Padang Loang selalu berupaya jujur dalam melakukan semua kegiatan. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, pemerintah Desa Padang Loang telah melakukan pengelolaan Keuangan desa sesuai dengan penerimaan anggaran desa, pencatatan, pengelolaan sampai dengan pengeluaran.

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,

Pengelolaan dana desa pada prinsip akuntabilitas dalam perspektif manajemen syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajiban menyampaikan amanah atau tanggungjawab kepada masyarakat maupun instansi yang telah ditetapkan bahwa pemerintah desa Padang Loang telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

#### 4) Transparansi

Transparansi dana desa merupakan bentuk Tabligh dimana memiliki arti kejujuran dalam segala kegiatan, maka dalam mengelola anggaran dana desa kejujuran ini tidak bisa dilepaskan kecuali dengan transparansi anggaran. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemimpin mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 101, yaitu:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata “sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui”.<sup>114</sup>

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Padang Loang di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan paska kegiatan sehingga semua kegiatan diharapkan mampu dipertanggungjawabkan. Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Padang Loang telah mewujudkan prinsip transparansi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya

<sup>114</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya

paparan transparansi dari penggunaan dana desa yang selalu terpasang di depan Kantor Desa Padang Loang dan Aula desa. sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Padang Loang.

### **3. Implikasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Padang Loang**

Berdasarkan penelitian di Desa Padang Loang Kabupaten Wajo mengenai implikasi pengelolaan desa internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

#### **a. Internal**

Berdasarkan mekanisme pengelolaan dan desa di struktur organisasi Desa Padang Loang secara sistematis disusun dengan baik. Akan tetapi Dana desa ini berfokus pada dua dusun saja pada hakekatnya itu ada 4 dusun yang ada di Desa Padang Loang.

#### **b. Eksternal**

Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintah yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dari hasil penelitian di Desa Padang Loang. Bahwa dana desa sangat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat desa Padang Loang yang saat ini masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian masyarakat desa Padang Loang. Dalam bidang pembangunan ini sangat membantu masyarakat setempat. Akan tetapi masih ada beberapa bidang yang tidak dirasakan oleh masyarakat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

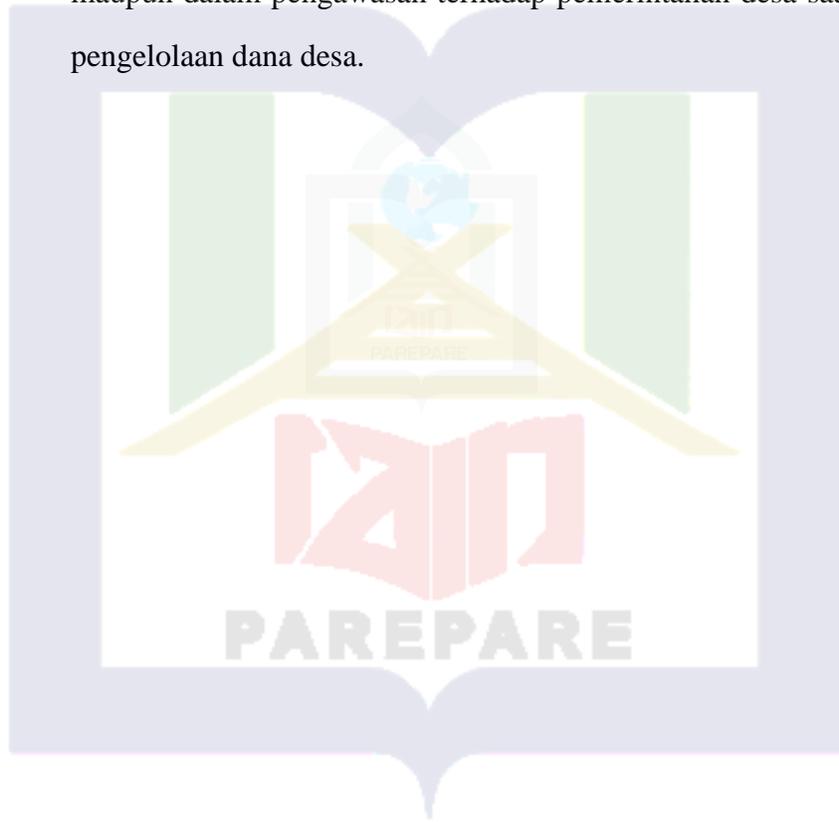
#### **A. Simpulan**

Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa telah menggunakan prinsip transparansi, akuntabel. Adapun implementasi prinsip-prinsip tersebut dengan perencanaan, penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dana desa secara lengkap. Upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur pemberdayaan, bidang umum dan bidang keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur dengan adanya perbaikan jalan.
2. Analisis manajemen syariah terhadap pengelolaan dana desa di desa Padang Loang Kabupaten Wajo sudah sesuai dengan fungsi manajemen syariah, dimana telah menjalankan semua fungsi manajemen . Serta menggunakan prinsip transparansi.
3. Implikasi pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Padang Loang, sangat membantu dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat akan tetapi dalam bidang penanggulangan bencana belum Nampak di masyarakat desa Padang Loang.

## B. Saran

1. Pemerintah desa Padang Loang terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan dana desa seefektif mungkin, sehingga manfaat dari pengelolaan dana desa ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk semua masyarakat Desa Padang Loang.
2. Masyarakat desa Padang Loang diharapkan untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan dana desa ini, baik dalam hal pembangunan di lapangan maupun dalam pengawasan terhadap pemerintahan desa saat melakukan pengelolaan dana desa.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abidin, Z, M. 2015 Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Adisamita, 2011 *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arsyad, Ioncolin. 2015 *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Astuty, Henny Sri. 2019 *Praktek Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula*, Sleman: Deepublish.

Ateng Syafrudin, dan Na'a Suprin. 2010 *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen dalam Desain Otonomi Desa*. P.T. Alumn, Bandung.

Ateng Syafrudin, dan Na'a Suprin. 2010 *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen dalam Desain Otonomi Desa*. (P.T. Alumn, Bandung:).

Athoillah, Anto. 2010 *Dasar-dasar Manajemen Bandung* : Pustaka Setia.

Aziz Nyimas Latifah Letty and R Siti Zuhro, 2018 *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia,).

Bintaro, 1989 *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,)

Djawa, Dominikus Leti; Rais, Dekki Umamur. 2019 *Penerapan Prilaku Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pendorong Partisipasi Masyarakat Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Baju*. (*Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*)

Effendi, Usman. 2014 *Asas Manajemen Depok*: PT. Raja Grafindo.

Fadilah, A. dan Makhrus, M. 2019 *Pengelolaan Dana Tabarru pada Asuransi Syariah dan Realisasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,

Farikha, Nur Lailatul. 2023 *'Manajemen Bisnis Syariah Pada UMKM Tas Dan Dompot Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rejoslamet'* (IAIN Ponorogo,).

Hafidhuddin, Didin. 2003 *Manajemen Syariah* Jakarta: Gema Insani.

- Hasibun, Malayu s.p. 2015 *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,).
- Herman, Sentot. 2010 Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen korporasi, *jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.
- Hendrik, Hendrik. 2011 'Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar Dan Danau Bawah Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau', *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*.
- Hendrik, Mohtar. 2017 'Kajian Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Dayun, Propinsi Riau', *Jurnal Teknologi*.
- Hukum, A. 2016 Pengaruh Kharja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Ibrahim Ahmad Abu Sin 2008 *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,).
- Juwita, Fera Nur. 2021 'Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)' (IAIN Kediri,).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, Pusat Bahasa.
- Karim, Adiwirman A. 2011 *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014 'Dana Desa', *Tersedia Pada: [Http://kppnmetro. Org/Dana-Desa](http://kppnmetro.org/dana-desa)*.
- Kiyosaki, Lechter, 2005 *Rich Dad's Who Took My Money*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, Mudrajad 2013 *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*, Yogyakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama.
- Lutfi, Hamidi. 2010 *Antara Realitas Politik dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Michael, Tudaro P Smith C Stphen, 2003 *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Malyu Hasibun, SP. 2006 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Martoyo, Susilo SE. 116 *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: BPFE.
- Marini Onsardi, dan Ezizia Selvia. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Hukum Palik Kabupaten Bengkulu Utara)*, (Jurnal :Universitas Muhammadiyah Bengkulu)
- Marvianto,R P. 2018 *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa (Study di Desa Mojogede Kec Balongpanggang Kab Gresik)*, Publik. Untang Surabaya.
- Muhammad, 2008 *Metodologi Penelitian Ekonomi islam pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,).
- Muhsin.Supriyanto. 2008 *Teknologi Informasi Perpustakaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nazir,Moh. 2014 *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,).
- Nur Sri Wahyuni and F Fitri, 2019 ‘Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros’, *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3.1
- Oktriawan,Wawan Adriansah Adriansah, and Siti Alisa, 2022 ‘Artikel Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Campakasari Kecamatan Cempaka Purwakarta: Kesejahteraan’, *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*.
- Prihadyatama Apdila and Sasmito Widi Nugroho. 2021 ‘Analisis Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Masyarakat’,*Maqis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*.
- Purwadinata, W.J.S. 1996 *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan,).
- Raharjo,Muhamad Mu’iz. 2021 *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara,).
- Rangga Icut Bawono, 2019*Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* (Gramedia Widiasarana Indonesia,).
- Ridwan M. 2018 *Tikollah dkk, JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan: Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*.
- Rudy,Badrudin. 2021 *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN).
- Rue, Geogre R. Terry Leslie W. 1990 *dasar-dasar manajemen*, jakarta:BumiAksara.

- Sakanto,Azwardi. 2012 Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Profinsi Sumatra Selatan, Tesis Fakultas ekonomi Universitas Seriwijaya.
- Supriyanto, S. 2021 Penelolan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah, ( Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal), ISTIKLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah.
- Siagian,Sondang P. 2015Manajemen Statistik Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharsimi, Arikunto. Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafri,Sofyan. 1996 *Manajemen Kontenporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutoro, et.Al. 2016 *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia( Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta.
- Suparman,E. 2014 ‘Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara’ (Tanjungpura University,).
- Sudirmna, 2009 Manajemen Sekola Dasar. Jakarta: Harapan Ilmu.
- Suhartini,Andewi. 2010 “Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi”.
- Sugiyono. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta,).
- Sujarweni,V.wiratna. 2015 *Metodologi Penelitian Bisnis & EKonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,).
- Torang,Syamsir. 2016 Organisasi dan Manajemen, Bandung: Alfabeta.
- Usmanh Abu Abdurrahmah, 2017 Perencanaan dalam Kaidah Islam, (On-line), tersedia di: <https://islam.wordpress.com/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-islam>.
- Undang-undang no 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal I Angka 31.
- Wicaksananta L Bagus Prihatin, Bq Ratna Mulhimah, and H Ahmad Amir Aziz, 2023 ‘Analisa Manajemen Syariah Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat’, *PALAPA*.

Williams, Chuck. 2000 *Managemen United States of America*: South-Western College Publishing.

Wulandari, Anita. 2017 *Pelaksanaan Perogram Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung.

Zerli Anita Dewi and Muhammad Subhan, 2023 'Tinjauan Manajemen Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi', *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*.







NAMA MAHASISWA : SYAMSIDAR  
 NIM : 19.2900.002  
 PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 JUDUL : IMPLIKASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
 PADANG LOANG KABUPATEN WAJO  
 ( TINJAUAN MANAJEMEN SYARIAH)  
**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara ditujukan pada Perangkat Desa Padang Loang Kabupaten Wajo**

1. Berapa Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Padang Loang tahun 2022?
2. Apakah pengelolaan dana desa sudah transparan dan bagaimana bukti transparannya?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Padang Loang?
4. Siapa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Padang Loang?

5. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait dana desa?
6. Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait dana desa, serta manfaat apa saja?
7. Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa?
8. Bagaimana proses pengelolaan dana desa?
9. Berapa dana desa yang turun dari pemerintah pusat dan di alokasi untuk apa saja dana tersebut? Tolong berikan penjelasan

**Wawancara ditujukan pada masyarakat di Desa Padang Loang Kabupaten**

**Wajo**

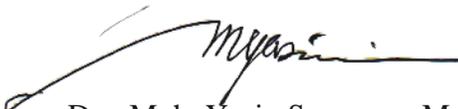
10. Bagaimana transparansi dana mengenai dana desa?
11. Untuk partisipasi masyarakat gimana?
12. Apakah dalam perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 Mei 2023

Mengetahui

Pembimbing Utama



Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.  
NIP. 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping



Sri Wahyuni Nur, S.E., M. Ak.  
NIP. 19890208 201903 2 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email:

**BERITA ACARA  
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SYAMSIDAR  
N I M : 19.2900.002  
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PADANG LOANG  
KABUPATEN WAJO

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLIKASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADANG LOANG KABUPATEN WAJO  
(TINJAUAN MANAJEMEN SYARIAH)

dengan alasan / dasar:

.....  
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

Parepare, 24 Januari 2024

Pembimbing Pendamping

Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.

Mengetahui;  
Dekan,

Dr. Muzdalfah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.5135/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KABUPATEN WAJO

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SYAMSIDAR  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Padang Loang, 15 Mei 2001  
 NIM : 19.2900.002  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
 Semester : IX (SEMBILAN)  
 Alamat : DESA PADANG LOANG, KECAMATAN PITUMPANUA, KABUPATEN WAJO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN WAJO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLIKASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADANG LOANG KABUPATEN WAJO(TINJAUAN MANAJEMEN SYARIAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 29 Agustus 2023



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
 NIP. 197102082001122002

PTSPWJ IP1116971

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan  
 Website : [dpmptsp.wajokab.go.id](http://dpmptsp.wajokab.go.id), Email : [dpmptsp.wajokab@gmail.com](mailto:dpmptsp.wajokab@gmail.com)

**IZIN PENELITIAN / SURVEY**  
**NOMOR : 2794/IP/DPMPTSP/2023**

**Membaca** : Surat Permohonan **SYAMSIDAR** Tanggal **5 September 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

**Mengingat** :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

**Memperlihatkan** :

- Surat dari INSITUT AGAMA ISLAM NEGRI PAREPARE INSITUT AGAMA ISLAM NEGRI PAREPARE Nomor : B.5135/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 Perihal PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
- Rekomendasi Tim Teknis Nomor **02887/IP/TIM-TEKNIS/IX/2023** Tanggal **5 September 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

**Menetapkan** :

Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : **SYAMSIDAR**

Tempat/Tanggal Lahir : **Padang Loang, 15 Mei 2001**

Alamat : **Padang Loang, Kecamatan Pitumpanua**

Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSITUT AGAMA ISLAM NEGRI PAREPARE**

Jenjang Pendidikan : **S1**

Judul Penelitian : **IMPLIKASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADANG LOANG KABUPATEN WAJO (TINJAUAN MANAJEMEN SYARIAH)**

Lokasi Penelitian : **DESA PADANG LOANG, KECAMATAN PITUMPANUA, KABUPATEN WAJO**

Jangka Waktu Penelitian : **6 September 2023 s/d 31 Oktober 2023**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
- Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
- Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**  
 Pada Tanggal : **5 September 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**




**H. NARWIS, S.E., M.Si.**  
 Pangkat: PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP : 196507151994031011

**No. Reg : 3871/IP/DPMPTSP/2023**  
 Retribusi : Rp.0.00



PEMERINTAHAN KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN PITUMPANUA  
DESA PADANG LOANG  
Jalan Poros Padang Loang Belawae, Desa Padang Loang, Kecamatan Pitumpanua 90992

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN  
Nomor: 070/290/DPL/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MANNANG, SE

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Padang Loang

Menerangkan Bahwa:

Nama : SYAMSIDAR

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Loang, 15 Mei 2001

Instansi/Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (i)

Alamat : Padang Loang, Kecamatan Pitumpanua

Telah selesai melakukan Penelitian di Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo pada tanggal 31 Oktober 2023. Dengan judul penelitian “ **IMPLIKASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADANG LOANG KABUPATEN WAJO (TINJAUAN MANAJEMEN SYARIAH)**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya dan kepada pihak terkait atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Padang Loang, 31 Oktober 2023

Kepala Desa Padang Loang

MANNANG, SE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MANNANG, SE

Alamat : Dusun Pusunge

Jabatan : Kepala Desa

Menekankan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Mannang,SE yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implikasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagian mestinya.

Padang Loang, 6 Oktober 2023

Yang di Wawancarai



MANNANG,SE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Paki

Alamat : Dusun Padang Loang

Pekerjaan : Petani

Jabatan : Ketua BPD

Menekankan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Syamsidar yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Implikasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagian mestinya.

Padang Loang, 24 September 2023

Yang di Wawancarai



Iwan Paki

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Made Ali

Alamat : Dusun Padang Loang

Pekerjaan : Petani

Jabatan : Skertaris BPD

Menekankan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Syamsidar yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Implikasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagian mestinya.

Padang Loang, 24 September 2023

Yang di Wawancarai



Andi Made Ali

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Andi Hasriana

Alamat :Desa Tanrogi

Jabatan :Bendahara

Menekankan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Syamsidar yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Implikasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagian mestinya.

Padang Loang, 23 September 2023

Yang di Wawancarai



Andi Hasriana

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kambe

Alamat : Dusun Padang Loang

Pekerjaan : Petani

Menekankan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Syamsidar yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Implikasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagian mestinya.

Padang Loang, 23 Oktober 2023

Yang di Wawancarai



Kambe

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cadde

Alamat : Dusun Padang Loang

Pekerjaan : Petani

Menekankan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Syamsidar yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Implikasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagian mestinya.

Padang Loang, 23 Oktober 2023

Yang di Wawancarai



Cadde

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Riska,S.Sos

Alamat :Dusun Batae

Jabatan :Sekretaris

Menekankan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Syamsidar yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Implikasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagian mestinya.

Padang Loang, 4 Oktober 2023

Yang di Wawancarai



Riska,S.Sos

Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan
1.	Mannang,SE	Padang Loang, 12-03-1970	Kepala Desa
2.	Riska,S.Sos	Tanrongi, 01-05-1990	sekretaris
3.	Andi Hasriana	Tanrongi, 04-09-1985	Bendahara
4.	Saharaddin	Padang Loang, 10-10-1991	Kaur umum dan perencanaan
5.	Herna Arif	Padang Loang, 07-06-1985	Kasi pemerintahan
6.	Dhedy	Pusunge, 05-01-1982	Kasi kesejahteraan dan pelayana
7.	Abbas	Lauwa,02-06-1978	Kepala dusun batae
8.	Alimuddin	Soppeng,12-06-1974	Kepala dusun padang loang
9.	Harahman	Tanrong,05-04-1988	Kepala dusun pusunge
10.	Agus	Bola Bakka,01-07-1973	Kepala dusun decoe

Foto Kegiatan Musyawarah



**PEMBANGUNAN TALUT DUSUN BATAE**



**PEMBANGUNAN RABAT JALAN TANI DUSUN PADANG LOANG**



DOKUMENTASI PERINTISAN PERKERASAN JALAN TANI DUSUN BATAE +  
DRAINASE



## BIODATA PENULIS



**SYAMSIDAR**, lahir di Padang Loang pada tanggal 15 Mei 2001 merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Hasanuddin dan Nur Hayati. Penulis beralamat di Desa Padang Loang, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu, pada tahun 2007-2013 menempuh pendidikan SDN 419 Tanrongi, kemudian pada tahun 2013-2016 melanjutkan pendidikan di MTS DDI Tobarakka, dan pada tahun 2016-2019 melanjutkan pendidikan di MA AL-Mubarak DDI Tobarakka. Pendidikan SI ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan Skripsi dengan Judul **“Implikasi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)”**